

**PELINDUNGAN HUKUM BIDAN DALAM PELAYANAN
KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
(PUSKESMAS) SIDOREKSO KALIWUNGU KUDUS**

SKRIPSI

**Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum**



Diajukan oleh:

MARLINDA RIFIANA FATMAWATI

22.C1.0087

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2026

ABSTRAK

Pelindungan hukum bagi bidan merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan karena bidan memiliki peran strategis dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak serta berhadapan dengan berbagai risiko hukum dalam menjalankan profesinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pelindungan hukum bagi bidan sebagai tenaga kesehatan serta pelaksanaan pelindungan hukum bagi bidan dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas Sidorekso Kaliwungu Kudus. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan studi dokumen yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pelindungan hukum bagi bidan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025, serta berbagai kebijakan internal fasilitas pelayanan kesehatan. Pelaksanaan pelindungan hukum di Puskesmas Sidorekso dilakukan melalui penerapan standar operasional prosedur, pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan, pelaksanaan informed consent, dokumentasi rekam medis, serta pendampingan oleh Dinas Kesehatan dan Ikatan Bidan Indonesia dalam penyelesaian sengketa. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan yuridis, sosiologis, dan teknis yang memerlukan penguatan kebijakan dan pembinaan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Pelindungan hukum, bidan, tenaga kesehatan, puskesmas, pelayanan kesehatan*

ABSTRACT

Legal protection for midwives is an important aspect in the implementation of health services because midwives have a strategic role in maternal and child health services and face various legal risks in their professional practice. However, the implementation of legal protection in health care facilities still faces obstacles, so a study is needed on its regulation and implementation. This study aims to analyze the legal protection arrangements for midwives as health workers and the implementation of legal protection for midwives in health services at the Sidorekso Kaliwungu Kudus Health Center. The research uses an empirical juridical method with an analytical descriptive approach. Data were obtained through literature studies, interviews, observations, and document studies, then analyzed qualitatively. The results of the study show that legal protection for midwives has been regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 17 of 2023 concerning Health, Government Regulation Number 28 of 2024, Regulation of the Minister of Health Number 13 of 2025, and internal policies of health service facilities. Its implementation is carried out through the implementation of SOPs, guidance and supervision of health workers, informed consent, documentation of medical records, and assistance from the Health Office and the Indonesian Midwives Association. Juridical, sociological, and technical obstacles point to the need for policy strengthening and sustainable coaching.

Keywords: *Legal protection, midwives, health workers, puskesmas, health workers*